

ARISTOKRAT DALAM PANGGUNG KEKUASAAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BONE

A. Burchanuddin¹, Sobirin², Abdul Karim³, Udin B. Sore⁴

¹Universitas Bosowa, Email: burchanuddin@universitasbosowa.ac.id

²Universitas Sawerigading, Email: sobirinhamid@gmail.com

³Universitas Bosowa, Email: abdul.karim@universitasbosowa.ac.id

⁴Universitas Bosowa, Email: b.sore@universitasbosowa.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dialektika aristokrat dalam panggung kekuasaan sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Bone. Dimana dalam realitas politik lokal pada umumnya kepala daerah didominasi oleh golongan aristokrat yang telah terkonstruksi selama 75 tahun sejak transisi pemerintahan dari sistem kerajaan ke sistem NKRI. Kondisi tersebut mengakibatkan sirkulasi kekuasaan yang terjadi hanya bertumpu pada kelompok elit aristokrat, sementara dalam konteks demokrasi modern membuka ruang bagi masyarakat umumnya untuk dapat menjadi kepala daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui *indepth interview* dan *focus group discussion* adapun penentuan informan dilakukan melalui pendekatan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dialektika aristokrat dan struktur budaya dalam politik lokal terkonstruksi dari relasi aktor dan struktur budaya yang terjadi pada ruang interaksi politik masyarakat. (2) Eksistensi aristokrat dalam panggung kekuasaan ditunjang oleh kelemahan partai politik lokal yang belum mampu menjadi lokomotif demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci : Aristokrat, Panggung kekuasaan, Politik lokal

1. PENDAHULUAN

Pergeseran dinamika politik lokal di Indonesia mengalami perubahan. Pada masa pra-kemerdekaan, politik lokal bercirikan kerangka *common law* atau hukum adat, sarat dengan feodalisme dan oligarki politik, di mana hanya kelompok aristokrat yang merupakan titisan raja yang bisa memerintah (Zuhro, Siti et al. 2010). Akibatnya, sebagian besar strata masyarakat dipersepsikan hanya sebagai abdi atau rakyat yang menjalankan perintah penguasa tanpa hak korektif dari kebijakan kekuasaan. Pada pasca proklamasi kemerdekaan, keberadaan masyarakat umum mulai masuk pada lembaga formal, situasi ini sedikit banyak merupakan warisan positif dari desain kolonial untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat biasa untuk berpartisipasi dalam kekuasaan melalui praktik politik modern. Kondisi ini membuat kelompok aristokrat (bangsawan) bersaing dengan masyarakat umum dalam memperebutkan kekuasaan pada ranah lokal. Selain persaingan antara kelompok tersebut, isu identitas budaya dan etnisitas juga memegang peranan penting dalam konteks demokratisasi di Indonesia umumnya dan kabupaten Bone khususnya.

Demokrasi politik modern yang lebih terbuka memberi ruang kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik, tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Bone kelompok aristokrat masih terlegitimasi daripada kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial, dan bahkan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Fakta tersebut diperkuat dari beberapa hasil penelitian yang mengurai politik identitas di Indonesia terkait dengan fenomena sosial politik di Kabupaten Bone, diantaranya (1) Imam Mujahidin Fahmid (2012) dalam bukunya yang berjudul *Identitas dalam Kekuasaan*.

Menyimpulkan bahwa etnisitas sebagai simbol identitas yang kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi. Pertarungan elit pada ranah politik dan ekonomi antar etnis tidak lepas dari dimensi historis. (2) Penelitian Abdul Halim (2014) menemukan bahwa politik lokal tidak lepas dari demokrasi lokal, yang didalamnya terdapat unsur kebebasan dalam merefleksikan nilai-nilai maupun norma-norma lokal. (3) Hasil penelitian Warsito Rahardjo (2013) menemukan bahwa kekuatan politik tradisional tumbuh seiring dengan proses otonomi daerah, sehingga kelompok elit mendapat kesempatan untuk mengukuhkan pengaruhnya kembali.

Hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa adanya gejala kebangkitan politik tradisional yang memberi ruang kekuasaan pada kelompok aristokrat dalam demokrasi modern. Simbol identitas yang dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan sebagai Kepala Daerah dalam praktik politik lokal di kabupaten Bone terjadi. Dalam catatan sejarah kekuasaan pada ranah politik lokal di Kabupaten Bone, sejak tahun 1951 hingga sekarang ini, kelompok aristokrat masih tetap dominan berada pada lingkaran kekuasaan sebagai kepala daerah. Uraian ini juga diperkuat dari data sekunder dimana terdapat 17 orang Kepala Daerah yang pernah memerintah di Kabupaten Bone melalui tiga fase transisi demokrasi: orde lama, orde baru dan reformasi diwarnai oleh keberadaan Kepala Daerah dari golongan aristokrat (bangsawan) hingga saat ini. Penelitian ini mempergunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens dan Reproduksi budaya Bourdieu sebagai pisau analisis untuk menelaah lebih dalam terkait relasi aktor dan struktur budaya bekerja dalam ranah politik lokal serta proses pertukaran modal yang dikontestasikan dalam arena politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivis yang melihat realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial. Informan penelitian terdiri atas 7 orang yang dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria tertentu yakni memiliki pengetahuan tentang sejarah politik, sosial, dan budaya di Kabupaten Bone. Setelah informan teridentifikasi, maka dilakukan wawancara mendalam terkait masalah penelitian yang telah dipersiapkan sesuai pedoman wawancara dan ditindak lanjuti dalam fokus group diskusi (FGD). Hasil wawancara dan FGD tersebut dianalisis melalui beberapa tahapan kerja, antara lain: melakukan reduksi data, penyajian data (display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

3. ANALISIS DATA

3.1. Dialektika Aristokrat dan Struktur Budaya Dalam Politik Lokal

Berakhirnya sistem kerajaan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 memberi pengaruh terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Bone. Kepala daerah pertama kalinya diangkat berdasarkan jabatan yang dipegang, yakni kepala Afdeling. Dalam sejarahnya *Afdeling* Bone terbentuk pada tahun 1905 saat Bone ditaklukkan oleh Belanda yang dikenal dengan istilah sejarah *Rumpa'na* Bone. Dalam historisnya Afdeling Bone merupakan aliansi dari tiga wilayah yaitu: Bone, Soppeng dan Wajo yang dikenal dengan istilah Tellumpocoe di Sulawesi Selatan. Adapun Afdeling Bone terbagi dalam 5 (lima) Onder Afdeling, antara lain Onder Afdeling Bone Utara, Onder Afdeling Bone Tengah, Onder Afdeling Bone Selatan, Onder Afdeling Wajo dan Onder Afdeling Soppeng.

Pada saat meleburnya sistem kerajaan ke NKRI maka, pada saat itu Kepala Afdeling Bone dijadikan sebagai Bupati Bone yang pertama dari golongan aristokrat. Sistem kerajaan telah berakhir tetapi pengaruh aristokrat masih sangat besar utamanya dalam mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Situasi sosial dan politik pasca kemerdekaan inilah yang membuat peran aristokrat dalam struktur pimpinan pemerintahan daerah menjadi sangat penting. Oleh

sebab itu kepala afdeling yang saat itu dijabat oleh golongan aristokrat Gowa pada tahun 1951 dilanjutkan oleh Andi Pangeran Pettarani Arung Macege diangkat menjadi kepala daerah kabupaten Bone yang kedua periode tahun 1951 – 1955, yang juga merupakan anak dari raja Bone ke 32 La Mappanyukki Sultan Ibrahim. Adapun kepala daerah di era orde lama, sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kepala Daerah Kabupaten Bone Di Era Orde Lama

No	Nama Bupati	Masa Jabatan	Unsur	Keterangan
1	Abd.Rachman Dg Mangung	1951	Bangsawan	Kepala Afdeling
2	Andi Pangeran Petta Rani	1951–1955	Bangsawan	Kepala Afdeling
3	Ma'mun Daeng Mattiro	1955–1957	Bangsawan	Bupati
4	Andi Mappanyukki	1957–1960	Bangsawan	Bupati
5	Andi Suradi	1960–1966	Bangsawan	Bupati

Sumber: Diolah dari data sekunder Bone dalam Angka 2022.

Terlihat dari tabel diatas pada masa transisi pemerintahan dari kerajaan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih dikenal pada masa itu era Orde lama. Kepemimpinan oleh golongan aristokrat masih tetap mendapatkan panggung kekuasaan meskipun tata kelola pemerintahan telah berubah. Keadaan ini dapat disimpulkan bahwa peran aristokrat dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia saat itu sangat diperhitungkan hingga mendapatkan kekuasaan meskipun tidak lagi seperti di era kerajaan.

Memasuki perodesasi pemerintahan Orde baru wajah politik Indonesia berubah dari periode pemerintahan sebelumnya yang penuh dengan gejolak politik perjuangan. Pada masa pemerintahan Orde baru diwarnai dengan kekuatan politik militer sebagai kekuatan yang dominan. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diberikan dua peran sekaligus yang biasa disebut Dwifungsi ABRI. Dengan peran yang dimiliki ini dimana ABRI selain sebagai kekuatan keamanan dan pertahanan serta sebagai kekuatan dalam sosial politik. Kondisi kepemimpinan daerah di periode ini juga diwarnai dengan kepala daerah dari golongan aristokrat yang sekaligus berprofesi sebagai militer. Tercatat sebanyak 7 orang kepala daerah dari unsur militer yang menjabat dari tahun 1966 sampai dengan tahun 2003. Sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kepala Daerah Kabupaten Bone Di Era Orde Baru

No	Nama Bupati	Masa Jabatan	Unsur	Preofesi
1	Andi Djamuddin (PLT)	1966–1966	Bangsawan	Sipil
2	Andi Tjajo (PLT)	1966–1967	Bangsawan	Sipil
3	Andi Baso Amir	1967–1969	Bangsawan	Militer
4	H. Suaib	1969–1976	Bangsawan	Militer
5	H.P.B. Harahap	1976–1982	Non Bangsawan	Militer
6	H. Andi Made Ali (PLT)	1982–1983	Bangsawan	Militer
7	Andi Syamsu Alam	1983–1988	Bangsawan	Militer
8	H. Andi Syamsoel Alam	1988–1993	Bangsawan	Militer
9	H. Andi Amir	1993–1998	Bangsawan	Militer

Sumber: Diolah dari data sekunder Bone dalam Angka 2022.

Dari Tabel 2 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di era Orde Baru kepala Daerah di Kabupaten Bone didominasi oleh kalangan Militer dari golongan aristokrat. Hal tersebut terkonstruksi karena didasari atas kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat biasa pada umumnya. Dimasa orde baru kekuasaan terpusat pada eksekutif dimana segala kepentingan daerah harus mendapatkan persetujuan pusat. Dinamika kekuasaan lokal di masa orde baru diwarnai dengan elit lokal yang terdiri dari golongan aristokrat, elit politik dan elit ekonomi yang semuanya mendapat kontrol pemerintah pusat, peran masyarakat dalam menentukan pilihannya praktis tidak mendapatkan ruang yang besar di masa tersebut.

Pasca tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 terjadilah konsolidasi politik dimana kekuatan-kekuatan baru muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau yang dikenal dengan istilah Era Reformasi, dinamika politik yang bergulir begitu cepat menyebabkan Konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami empat kali proses amandemen. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) adalah amanat dari agenda reformasi untuk suatu tujuan nasional dalam menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan Negara yang demokratis, hal ini berdampak pada berubahnya konstelasi politik nasional dari bentuk kewenangan pemerintahan yang sentralistik ke bentuk pemerintahan yang desentralistik dimana pembicaraan mengenai hal ini terkait erat dengan persoalan otonomi daerah dalam konteks politik lokal.

Hal yang terpenting dari amandemen tersebut adalah terbentuknya sistem pemilihan secara langsung baik Presiden, DPR dan Bupati/Walikota. Dari hasil penelusuran data dan informasi terkait keberadaan aristokrat dalam panggung kekuasaan di Kabupaten Bone peneliti melihat bahwa sirkulasi kekuasaan sebagai kepala daerah dalam kontestasi politik lokal di era reformasi belum bergeser dari golongan aristokrat, sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kepala Daerah Kabupaten Di Era Reformasi

No	Nama Bupati	Masa Jabatan	Unsur	Preofesi
1	H. Andi Amir	1998 – 2003	Bangsawan	Militer
2	Andi Idris Galigo	2003 – 2008	Bangsawan	Sipil
3	Andi Idris Galigo	2008 – 2013	Bangsawan	Sipil
4	Andi Fahsar M. Pajalangi	2013 - 2018	Bangsawan	Sipil
5	Andi Fahsar M. Pajalangi	2018 - 2023	Bangsawan	Sipil

Sumber: Diolah dari data sekunder Bone dalam Angka 2022.

Dari Tabe 3 diatas dapat dimaknai bahwa dalam era reformasi telah dilaksanakan 5 kali pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Bone. Dimana dalam konteks demokrasi sesungguhnya era reformasi telah membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencalonkan diri dan memilih kepala daerahnya. Tapi pada kenyataannya dalam 5 kali tahapan pemilihan kepala daerah terlihat bahwa golongan aristokrat masih mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin sebagai kepala daerah di Bone. Dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dapat dimaknai bahwa keterpilihan golongan aristokrat sebagai kepala daerah secara tidak langsung terkonstruksi melalui akses kekerabatan dan kemampuan personaliti yang memadai menjadikan golongan aristokrat di Bone dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Peristiwa masa lalu yang menempatkan posisi aristokrat dalam menerima perlakuan berbeda dari masyarakat umumnya oleh kolonial

belanda, khususnya dalam akses pendidikan berdampak pada warna pemerintahan yang didominasi oleh golongan elit tersebut pada waktu dulu.

Dalam masyarakat Bugis sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian terikat dalam istilah “*Pangaderreng*” (pedoman tingkah laku) ketiga sistem ini tak satupun yang bekerja sendiri secara terpisah, tetapi saling terkait tidak mungkin satu masyarakat dapat dimengerti secara utuh, tanpa memahami keterkaitan itu (Rahman Rahim, 2011). Untuk memahami orang bugis, maka agen dan struktur bukan sesuatu yang terpisah tetapi saling memberi pengaruh sebagai landasan pembentukan pola tingkah laku orang bugis. Sebagaimana hasil studi Giddens yang tidak memisahkan antara agen dan struktur, struktur dalam hal ini bukan bersifat eksternal bagi aristokrat melainkan dalam pengertian tertentu lebih bersifat internal. Terkait dengan aspek internal ini Giddens menyandarkan pemaparannya pada diri seorang subjek yang memiliki sifatnya yang otonom serta memiliki andil untuk mengontrol struktur itu sendiri (Giddens, 2008). Begitupun aristokrat dalam dialektikanya selalu diuntungkan oleh opini dominan masyarakat (*doxa*) terkait identitas pemimpin dari perspektif budaya.

3.2. Eksistensi Aristokrat Dalam Panggung Kekuasaan Lokal

Kabupaten Bone adalah sebuah daerah yang memiliki budaya lokal yang kuat, hampir semua segi kehidupan masyarakat dan individu mencerminkan pada adat dan agama. Filosofi “*Taro ada, Taro Gau*” yang hidup ditengah masyarakat menandakan tingginya sikap konsistensi orang bugis Bone antara apa yang diucapkan dan yang diperbuat (Abdul Rahim, 2012). Dalam membangun relasi antar individu dan individu, individu dan masyarakat serta berbagai kelompok dalam masyarakat, orang bugis Bone masih menjunjung tinggi nilai – nilai budaya “*Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge*” (saling menghormati, saling memperbaiki dan saling mengingatkan) filosofi ini masih melekat dan terinternalisasi dalam diri masyarakat (Ambo Gani, dkk, 1990). Untuk memahami orang bugis Bone dalam kontestasi politik lokal, maka agen dan struktur bukan sesuatu yang terpisah tetapi saling memberi pengaruh sebagai landasan pembentukan pola tingkah laku orang bugis Bone. Sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadian. Ketiganya ditemukan dalam literasi bugis, yang disebut lontara.

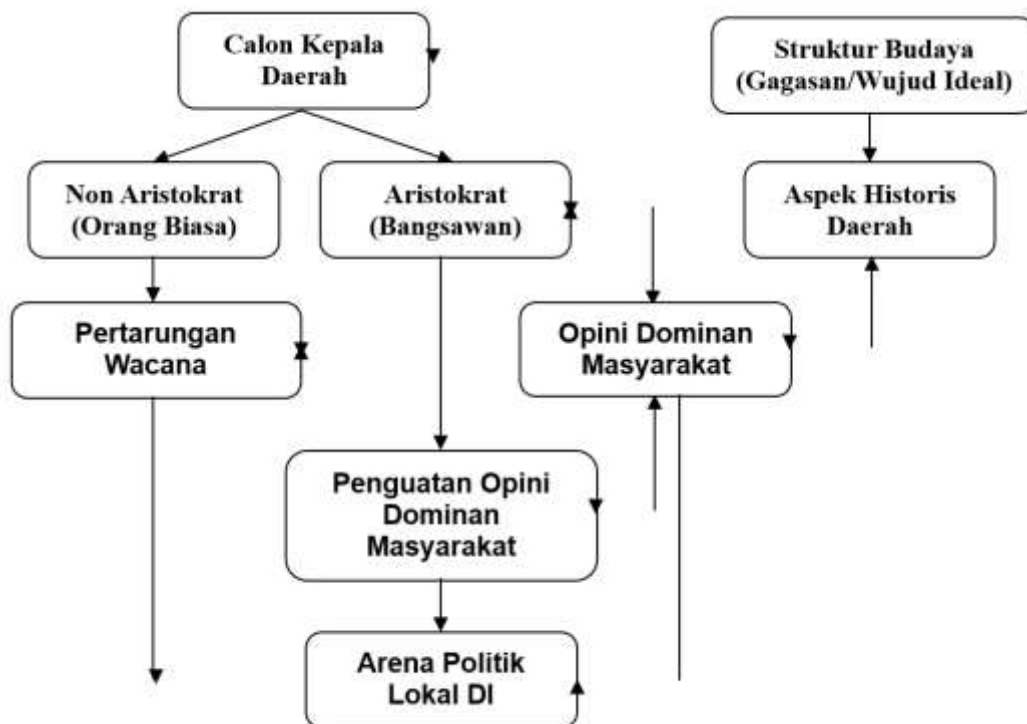
Nilai-nilai budaya yang dipahami masyarakat Bone terkait kepemimpinan dapat terlihat dalam setiap kontestasi politik lokal yang ada, identitas kebangsawanan adalah sesuatu yang melekat kuat pada diri seseorang dan mendapatkan apresiasi yang besar dari masyarakat dalam lingkungan sosialnya (Fahmid, 2012). Dikarenakan nilai – nilai kultural terkait kepemimpinan masih melekat kuat pada masyarakat bone, mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagian besar dari golongan Bangsawan dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon kepala daerah dari Bangsawan yang lainnya. Ruang keterpilihan Bangsawan sebagai kelompok aristokrat dalam setiap kontestasi politik lokal di Bone sangat terbuka dan mempunyai peluang kemenangan dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya. Habitus kepemimpinan mereka telah menjadi kesadaran politik yang tertanam dalam diri kaum aristokrat, sebagai sesuatu yang terinternalisasi dalam merekonstruksi tindakan yang memiliki kecenderungan kekuasaan.

Kelemahan calon kepala daerah non aristokrasi dalam politik lokal di Bone, terlihat dari perspektif modal sebagaimana diutarakan oleh Bourdieu, pada umumnya kandidat calon Bupati dari golongan ini hanya mempunyai tiga modal yang dipertaruhkan dalam sebuah arena politik, yaitu: modal ekonomi, modal intelektual serta modal sosial, sementara modal simbolik dan modal kultural sangat lemah bahkan terkadang tidak dimiliki. Ketiga modal yang melekat pada kandidat non aristokrat juga dimiliki oleh kandidat dari golongan aristokrasi, bahkan mereka sangat diuntungkan dengan modal simbolik dan modal kultural yang melekat pada jati diri mereka. Hal inilah yang menjadi dasar terkonstruksinya kekuasaan aristokrasi pada arena politik lokal di Bone sejak tahun 1951 hingga saat ini.

Sementara dalam perspektif Bourdieu yang lain dominasi kelompok aristokrasi dalam kekuasaan politik lokal di Bone lebih didominasi dengan adanya doxa sebagai kepercayaan bersama yang tidak dipertanyakan lagi dalam arena politik lokal di Bone. Hal ini dapat terlihat dari stigma masyarakat yang mengatakan bahwa jika bukan golongan Bangsawan, maka sulit bagi seseorang untuk menjadi kepala daerah di kabupaten Bone. Doxa inilah yang disatu sisi menguntungkan identitas bagi kelompok aristokrasi, sehingga artikulasi tindakan aktor yang ditujukan untuk membangun dan menjaga opini (ortodoxa) dilakukan dengan cara memelihara hubungan kekerabatan, menjaga tali silaturahmi diantara garis keturunan yang lebih dekat, meningkatkan kualitas pendidikan dan intelektualitas mereka serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi sosial budaya yang ada. Peran inilah yang secara tidak langsung memperkuat posisi modal yang dimiliki sehingga selalu mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam ranah politik lokal di Kabupaten Bone. Arena politik adalah ruang sosial yang sangat dinamis, oleh karena itu di dalam sebuah doxa terdapat pertarungan dunia wacana (heterodoxa) yang selalu dimunculkan untuk memberikan penilaian negatif terhadap dominasi aristokrasi dalam kekuasaan kepala daerah dalam sistem demokrasi modern di Kabupaten Bone.

Dari temuan penelitian teridentifikasi pertarungan wacana (heterodoxa) bahwa menjadi pemimpin di Bone bukan hanya golongan Bangsawan tetapi masyarakat umum juga dapat menjadi pemimpin, dimainkan oleh para pendukung calon kepala daerah dari non aristokrat, sebagai bentuk strategi dalam mematahkan kekuatan golongan aristokrat dari sebuah dominasi dukungan masyarakat. Dengan bergulirnya wacana sebagai heterodoxa tersebut membuat semakin eksisnya para aristokrat dalam panggung politik lokal dengan menjaga opini dominan masyarakat untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki basis dukungan yang kuat di masyarakat. Namun ketika kontestasi kekuasaan tersebut terjadi, maka resistensi perpecahan keluarga dapat terjadi dikarenakan ada calon dari golongan aristokrat yang mempunyai hubungan kekerabatan cukup dekat dengan sumber daya yang seimbang.

Gambar 1. Eksistensi Aristokrat Dalam Politik Lokal Di Bone



Sumber: Data primer setelah diolah, 2022.

Ruang keterpilihan golongan aristokrat dalam setiap kontestasi politik dapat juga ditelusuri dari habitus mereka yang selama ini terbentuk melalui proses dialektika yang sekian lama antara agen dengan dunia sosialnya. Habitus tidaklah ahistoris, habitus kepemimpinan aristokrat terbentuk dari proses kesejarahan yang bermula semenjak mereka terlahir dan berbeda dengan masyarakat lainnya. Habitus kepemimpinan telah menjadi kesadaran yang tertanam dalam diri mereka, sebagai sesuatu yang terstruktur dan berproses dalam memproduksi tindakan yang memiliki kecenderungan kekuasaan. Habitus kepemimpinan yang dimiliki golongan aristokrat bukan merupakan refleksi atau pertimbangan rasional, tetapi terjadi secara alamiah. Pembawaan diri yang khas tanpa disadari merupakan hasil pembelajaran dan internalisasi sejumlah nilai dalam waktu yang sangat panjang. Internalisasi nilai – nilai kepemimpinan ini terkonstruksi melalui interaksi dalam lingkungan keluarga dan kekerabatan yang luas. Sehingga pada umumnya golongan aristokrat yang terlibat dalam pemerintahan di Kabupaten Bone menempati posisi strategis dalam struktur birokrasi.

Disatu sisi partai politik lokal di Bone sangat sulit menempatkan kader untuk diusung dalam pilkada, keadaan ini memaksa partai politik mencari figur yang tepat untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Pilihan partai politik pada umumnya mengusung calon bupati dari golongan aristokrat dikarenakan elit ini mempunyai jaringan kekerabatan yang luas dan tetap eksis di mata masyarakat. Dari hasil fokus group diskusi (FGD) teridentifikasi bahwa partai politik lokal di Bone terkesan ragu dalam mengusung calon kepala daerah yang bukan dari golongan Bangsawan karena terkendala pada aspek nilai jual ke masyarakat meskipun mempunyai pengalaman, pendidikan dan kemampuan modal yang cukup. Partai politik di bone dapat dikatakan belum mampu menjadi lokomotif demokrasi di Bone, harapan demokrasi yang memberi ruang kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah terkesan tertutup.

4. KESIMPULAN

Dialektika aristokrat dan struktur budaya dalam politik lokal terkonstruksi dari relasi aktor dan struktur budaya yang terjadi pada ruang interaksi politik masyarakat, dimana aktor politik dari kalangan aristokrat diuntungkan oleh internalisasi nilai kultural pada masyarakat Bone yang masih kuat.

Eksistensi aristokrat dalam panggung kekuasaan ditunjang oleh kelemahan partai politik lokal yang belum mampu menjadi lokomotif demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, sehingga kelompok aristokrat lebih mendapatkan ruang dukungan oleh partai politik dengan mempertimbangkan opini dominan (*doxa*) yang menjadi pilihan masyarakat.

REFERENSI

- Gani, Ambo dkk, 1990. *Wasiat – Wasiat Dalam Lontarak Bugis*. Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- BPS Kabupaten Bone, *Kabupaten Bone Dalam Angka 2022*. Diakses pada 26 Januari 2023, <https://bonekab.bps.go.id/publication/2022/02/25/af098aa77a6a32a2f7a552c4/kabupaten-bone-dalam-angka-2022.html#:>
- Giddens, Jonathan. 2008. *Social Theory Today, Panduan Sistematis Tradisi Dan Tren Terdepan Teori Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Haboddin, Muhtar, 2012. *Menguatnya Politik Identitas Dalam Ranah Lokal*, <https://www.neliti.com/id/publications/31001/menguatnya-politik-identitas-di-ranah-lokal>
- Halim, Abdul. 2014. *Politik Lokal/Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (perspektif teori powercube, modal dan panggung)*. Yogyakarta; LP2B

- Imam Mujahidin Fahmid, 2012, *Identitas Dalam Kekuasaan; Hibriditas Kuasa Uang dan Makna dalam Etnis Bugis – Makassar*. Makassar; Innawa-Ispei.
- Rahim, Abdul. 2012. *Pappaseng; Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar*, Sulawesi Selatan; Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata.
- Rahman Rahim. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Jakarta; Penerbit Ombak.
- Rahardjo, Warsito. 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. (Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 2).
- Zuhro, Siti et al. 2010. *Demokrasi Lokal*. Yogyakarta; Penerbit Ombak.